



# LAPORAN PPID PEMBANTU

DINAS KESEHATAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

2020

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	1
KATA PENGANTAR .....	2
Bab I .....	3
Bab II .....	4
Bab III .....	9
Bab IV .....	13
Bab V .....	15
Lampiran :	
Tabel 1.1. Tabel Surat Keputusan PPID 2021.....	52
Tabel 2.1. Tabel Daftar Informasi Publik 2021 .....	57

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur berkomitmen di dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan menerapkan sistem yang transparasi secara penuh. Penyelenggaraan yang transparan sesuai dengan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Dengan mengedepankan komitmen terhadap tata Kelola pemerintahan yang terbuka, akuntabel, partisipatif dan inovatif akan melahirkan kebijakan publik yang berkualitas dan masyarakat bisa mengakses informasi publik secara mudah. Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan karunia dan rahmat-Nya, sehingga dapat tersusun Laporan PPID Tahun 2020, yang selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan informasi sekaligus evaluasi pelaksanaan PPID Tahun 2021. Laporan PPID 2020 merupakan kegiatan PPID Pembantu Dinas Kesehatan, dengan harapan bisa memberikan gambaran mengenai apa yang sudah dilakukan tim PPID dalam satu tahun berjalan dari masing-masing bidang dan Sekretariat di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

Terimakasih yang tak terhingga kepada semua anggota tim PPID pembantu Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang telah mendukung kegiatan PPID hingga terselesainya laporan ini. Semoga penyusunan laporan ini bisa memberikan manfaat dan mendapat ridlo Allah SWT. Amien

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surabaya, 13 Januari 2021  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI JAWA TIMUR



## BAB I

### LATAR BELAKANG

#### Layanan Informasi Publik Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Dimasa Pandemi Covid -19 derasnya arus informasi yang diterima oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur saat ini, membuat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur memandang perlu untuk membuka akses informasi kepada masyarakat. Agar publik memperoleh informasi secara resmi dan lengkap mengenai pelaksanaan pemerintah melalui berbagai saluran informasi media sosial. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan UUD 1945 Pasal 28 F tentang informasi merupakan hak asasi manusia yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi publik dan Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 14 tahun 2008, setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang terkait dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Guna menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi yang terkait dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dan efisien serta akuntabel.

Konteks kelahiran UU KIP adalah untuk pemberantasan korupsi, penegakan hak asasi manusia dan tata kelola pemerintah yang baik. Melalui UU KIP, publik dapat mengetahui, ikut mengawasi serta berperan aktif atas jalannya pemerintahan agar berjalan sesuai koridor yang ada.

Menindak lanjuti hal tersebut, pemerintah provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk menjalankannya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur No 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Implikasi selanjutnya dari pelaksanaan UU KIP tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nomor 821.2/7156/101.1/2012 tentang Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

## BAB II

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur nomor : 440/93/KPTS/201.1/2020 Tanggal 13 Januari 2020 dan ada perubahan Keputusan menjadi nomor 440/1462/KPTS/102.1/2020 tanggal 3 Agustus 2020 terkait perubahan pejabat eselon di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

### A. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

#### Visi :

Terwujudnya pelayanan informasi yang baik, transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur untuk menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas.

#### Misi :

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab
2. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi
3. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi
4. Mewujudkan keterbukaan informasi di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dengan proses cepat, mudah dan sederhana

#### Maklumat Pelayanan Informasi Publik :

Informasi publik merupakan kebutuhan dan hak setiap orang, maka selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, kami berupaya memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan berkomitmen untuk :

1. Memberikan informasi publik sesuai Undang - Undang Nomor 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
3. Memberikan layanan informasi, memanfaatkan teknologi informasi yang mudah diakses masyarakat;

Tugas :

Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

Fungsi :

1. Tugas PPID Pembantu yaitu mengelola dan memberikan layanan permohonan informasi publik serta dokumentasi di satuan kerjanya
2. Pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh di satuan kerjanya
3. Penyeleksian dan pengujian data dan/atau informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
4. Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik
5. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi
6. Pelaksanaan koordinasi dengan PPID Utama/Provinsi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi Publik

Rencana strategi di tahun 2020 sebagai berikut :

Pada tahun 2020 dilakukan langkah-langkah penyempurnaan semua instrumen dan sarana prasarana untuk melaksanakan secara penuh program Unit Pelayanan Informasi Publik Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang terintegrasi, komprehensif, dan terukur. Disamping itu, perlu pula dilakukan penyempurnaan pada semua dasar hukum unit pelayanan, anggota unit pelayanan, sumber daya manusia, dan anggarannya. Berikutnya adalah penyempurnaan prosedur dan mekanisme kerja serta tata laksana termasuk di dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik. Langkah-langkah penyempurnaan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan pelayanan yang telah dilakukan.

Visi, Misi dan Maklumat, menjadi payung hukum bagi PPID dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi public. PPID Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur terus berusaha untuk meningkatkan layanan informasi publik kepada masyarakat dengan prinsip layanan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan caranya sederhana. Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam akses informasi Publik. PPID Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur memanfaatkan sistem layanan informasi publik melalui pengembangan website :

<http://ppid.dinkes.jatimprov.go.id/>

dan berbasis android dengan alamat URL :

<https://play.google.com/store/apps/details?id=id.go.jatimprov.dinkes.ppid>

Website dan alamat URL tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengakses seluruh informasi publik Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, serta masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi secara elektronik. Selain layanan permohonan informasi berbasis elektronik melalui <http://ppid.dinkes.jatimprov.go.id/> dan <https://play.google.com/store/apps/details?id=id.go.jatimprov.dinkes.ppid> Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur juga menyediakan meja layanan informasi bagi masyarakat yang mengajukan permintaan informasi dengan cara datang langsung ke PPID Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

- a. Nama PPID : PPID Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
- b. Alamat : Jend. A. Yani No.118 Telp.
- c. Telephone : (031) 8280910 – 8280713 Fax (031) 8290423

Surabaya. Dalam memberikan layanan Informasi kepada pemohon informasi secara langsung, PPID Pembantu menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dilaksanakan pada hari kerja, dengan jadwal sebagai berikut :

Senin – Kamis : 07.00 sd 15.00 WIB istirahat 12.00 – 13.00 WIB  
Jum'at : 09.00 sd 15.00 WIB istirahat 11.00 - 13.00 WIB

## B. Kebijakan Layanan Informasi Publik

Dalam memberikan layanan informasi publik kepada pemohon informasi publik. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur berpedoman pada Undang-undang nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Menjadi kewajiban bagi PPID Dinas Kesehatan dan melaksanakan ketentuan terkait hak akses atas informasi publik dengan segala konsekuensinya. Undang-undang tentang keterbukaan informasi telah menekankan bahwa setiap informasi harus diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan sederhana. Sehingga prinsip tersebut menjadi tantangan bagi PPID Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara cepat, efektif dan efisien dengan memanfaatkan sarana dan/atau media elektrik dan non elektronik sehingga masyarakat dapat secara cepat memperoleh informasi publik sesuai dengan kebutuhannya.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, dalam memberikan layanan informasi secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan sederhana, yang dituangkan dalam Standard Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik sebagai berikut :

- Sop pelayanan permohonan informasi;
- Sop permohonan informasi secara langsung;
- Sop pelayanan keberatan;
- Sop laporan pelayanan;
- Sop penyusunan daftar informasi publik;
- Sop uji koensemensi;
- Sop sengketa Informasi

### BAB III

Pelayanan Publik menjadi sebuah tanggung jawab utama pemerintah kepada masyarakat, baik pelayanan dalam bentuk administrasi publik dan jasa publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kesadaran Publik untuk mengakses informasi publik dapat menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mengawal pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Untuk mewujudkan pelayanan informasi publik Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mempunyai komitmen yang kuat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan. Hal ini telah dibuktikan dengan adanya informasi publik di berbagai media online, yaitu : website, Twitter, WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, dan Layanan Pengaduan Online.

Dukungan terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik yang dikelola oleh PPID Dinas Kesehatan, sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah SDM yang terlibat sesuai dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Nomor : 440/93/KPTS/201.1/2020 Tanggal 13 Januari 2020 dan ada perubahan Keputusan menjadi nomer 440/1462/KPTS/102.1/2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, sejumlah 45 orang dengan latar belakang pendidikan sebagai berikut :

- a. Pasca Sarjana (S2) : 22 Orang
- b. Sarjana (S1) : 20 Orang
- c. SMA/D3 : 3 Orang

2. Sarana dan Prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana layanan informasi publik :

- a. Front Desk/Meja Layanan Informasi Publik, terdiri dari meja dan kursi petugas, meja dan kursi tamu, komputer dan jaringan internet, printer, telp/fax, 1 unit plasma TV serta instrument untuk transaksi layanan informasi berupa formulir permohonan, formulir keberatan, tanda bukti penerimaan permintaan, buku register permintaan informasi dan register keberatan.
- b. Ruang Sekretariat PPID, dilengkapi dengan komputer dan jaringan internet, printer, lemari arsip, meja dan kursi petugas.

Tabel 1.1.

Daftar Inventaris barang PPID tahun 2020

No	Ruang Pelayanan PPID	Jumlah
1	Meja Resepsionis	1 Buah

2	Komputer CPU	1 Buah
3	Telephon	1 Buah
4	Kursi kerja	2 Buah
5	Kursi Tamu (Kursi Tunggu)	2 Buah
6	TV	1 Buah
II	Ruang Sekretariat PPID	
1	Laptop	1 Buah
2	Printer	1 Buah
3	Kursi	5 Buah
4	Meja Kerja	2 Buah
5	TV	2 Buah
6	Lemari Arsip	2 Buah
7	Banner PPID	1 Buah

3. Layanan Informasi PPID UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Pemutakhiran konten PPID dan Daftar Informasi Publik pada website [www.dinkesjatim.go.id](http://www.dinkesjatim.go.id) yang terkait dengan informasi publik sesuai peraturan KI nomor 1 tahun 2010 selalu diperbarui dan dievaluasi secara berkala seperti profil, ringkasan informasi program/kegiatan, ringkasan informasi tentang kinerja, ringkasan laporan keuangan, ringkasan laporan akses informasi publik, informasi tentang peraturan, keputusan dan atau kebijakan yang berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh badan publik, informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, informasi tentang tata cara pengaduan, informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa, serta informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di kantor badan publik.

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Memiliki 12 UPT dengan 100% UPT Memiliki WEB Institusi dan masih 77% yang memiliki webb PPID, ada peningkatan 20% dibandingkan tahun 2019. Harapan di tahun 2022 semua UPT memiliki web PPID sehingga keterbukaan yang bersifat transparan dan cepat tanggap terhadap pengaduan masyarakat tercapai.

Tabel 1.2

Kepemilikan Website di UPT. Dinas Kesehatan Tahun 2020

NO	UPT DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR	WEBB INSTITUSI	WEBB PPID
1	RS MATA MASYARAKAT SURABAYA	ADA	ADA
2	RS PARU SURABAYA	ADA	BELUM
3	RS PARU MANGUNHARJO MADIUN	ADA	ADA
4	RS PARU DUNGUS MADIUN	ADA	ADA
5	RS PARU JEMBER	ADA	BELUM

6	RS KUSTA KEDIRI	ADA	ADA.
7	RS KUSTA SUMBERGLAGAH MOJOKERTO	ADA	ADA
8	RSU MOHAMMAD NOER PAMEKASAN	ADA	ADA
9	RS KARSA HUSADA BATU	ADA	ADA.
10	LABORATORIUM GIZI SURABAYA	ADA	ADA
11	BALAI LABORATORIUM HERBAL	ADA	BELUM
12	LATKESMES MURNAJATI	ADA	BELUM

4. Anggaran PPID

Untuk Kegiatan PPID Tahun 2020 ada 3 kali Rapat dengan 2 Narasumber yang di danai dari APBD Tahun 2020 sebesar Rp 7.980.000,- Dengan evaluasi penyerapan 100%. Dana PPID Tahun 2020 dimanfaatkan untuk Rapat tentang Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi PPID di Lingkungan Dinas Kesehatan beserta UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

5. Daftar Informasi Publik (DIP) PPID Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur merupakan usulan dari Seksi dan Sub Bagian Tata Usaha yang ada di Dinkes Provinsi Jawa Timur (Tabel 1.1 terlampir)
6. Permohonan Informasi Publik

Pada Tahun 2020 informasi yang paling banyak dimohon melalui layanan informasi desk 0,46% (turun 41,64% dibanding data 2019), Email PPID 85% (ada kenaikan 45%), FB 2% (ada penurunan 4%), Instagram 4% (ada penurunan 1%), Website Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 9% (ada Kenaikan 3%), karena pandemik covid pengaduan 99,64% melalui media social..

Tabel I.3

Jenis Pengaduan di PPID Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020.

BULAN	PENGA DUAN LANGS UNG	JUMLAH PENGADUAN MELALUI ON LINE				TOTAL PENGADUAN	KECEPAT AN RATA- RATA PENYELE SAIAN PENGADU AN
		EMAIL PPID	FB	INSTAGRAM	WEB SITE		
Jan-20	3	20	1	2	8	34	< 24 Jam
Peb 2020	0	37	1	2	10	50	< 24 Jam
Mar-20	0	55	1	2	2	60	24 Jam
Apr-20	0	53	1	2	6	62	24 Jam
Mei 2020	0	49	1	2	4	56	< 24 Jam
Jun-20	0	44	1	2	6	53	< 24 Jam
Jul-20	0	64	1	2	8	75	< 24 Jam
Ags 2020	0	44	1	2	3	50	24 Jam
Sep-20	0	58	1	2	2	63	24 Jam
Okt 2020	0	43	1	2	4	50	24 Jam
Nop 2020	0	61	1	2	4	6	24 Jam

Des 2020	0	29	1	2	2	34	24 Jam
JUMLAH	3	557	12	24	59	655	24 Jam
EVALUASI % 2020	0,46%	85%	2%	4%	9%		
EVALUASI % 2019	42%	40%	6%	5%	6%	100%	24 Jam

## BAB IV

Setiap badan publik dalam memberikan layanan informasi publik berdasarkan pelayanan informasi secara cepat dan tepat waktu sesuai Pasal 2 ayat 3 Undang-undang KIP. Ketentuan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi setiap badan publik untuk mewujudkan layanan tersendiri bagi setiap badan publik untuk mewujudkan layanan informasi publik kepada masyarakat. Untuk mewujudkan pelayanan informasi secara cepat undang-undang KIP telah memberikan solusi kepada setiap badan publik agar mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat. Undang-Undang KIP telah memberikan solusi kepada setiap badan publik agar mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar dengan memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab pertama, PPID Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur telah menyediakan sarana dalam memberikan layanan informasi informasi publik kepada masyarakat. Sarana untuk mengajukan permohonan informasi publik dapat melalui elektronik (email, faksimile, facebook, instagram, surat) dan non elektronik (datang langsung untuk mengisi form permohonan informasi publik). Publik dapat mengakses informasi publik melalui website resmi <https://dinkes.jatimprov.go.id>. Disadari bahwa layanan informasi publik yang diberikan oleh PPID Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur belum maksimal, hal ini dikarenakan terdapat kendala-kendala yang dihadapi sebagai berikut :

### a. Kendala Internal

Kendala teknis adalah kendala ketersediaan sarana dan prasarana layanan informasi Publik yang dimiliki Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur masih minim dan antara lain sebagai berikut :

- Sumber Daya Manusia : petugas yang di meja resepsionis penguasaan ketrampilan menggunakan komputer kurang dan kurangnya pengetahuan informasi penanganan pengelolaan informasi khususnya dalam rangka menunjang penerapan keterbukaan informasi
- Sumber daya manusia (SDM) yang masuk Tim SK PPID Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam memberikan layanan permohonan informasi publik sebanyak 41 orang, sedangkan yang khusus memberikan pelayanan informasi publik secara digital maupun datang langsung hanya berjumlah 4 orang. Masih belum paham mengenai tugas dan fungsi dari PPID
- Belum tersedianya system pengarsipan yang memadai baik itu pengarsipan data dalam bentuk hardcopy maupun dalam bentuk file digital (Soft copy)

b. Kendala Eksternal

Kondisi publik dalam berperan menjadi salah satu kunci suksesnya penerapan keterbukaan informasi. Kondisi masyarakat yang berasal dari berbagai lapisan dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang berbeda-beda menyebabkan adanya sebagian besar masyarakat yang kurang memahami informasi yang mereka butuhkan.

- Adanya pemohon informasi yang tidak memberikan umpan balik setelah menerima informasi
- Masih adanya pihak pemohon informasi tidak dimanfaatkan sesuai tujuan permohonannya. Disamping itu jumlah permohonan yang diajukan melebihi kapasitas kompetensi pemohon terkait dengan tujuan permohonannya. Untuk itu perlu dikuatkan regulasi yang mengikat dan mengatur penggunaan informasi

**Penyelesaian Sengketa Informasi Publik :**

Di Tahun 2020 tidak terdapat sengketa informasi publik

**Penghargaan PPID Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur :**

Dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat, Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur menggelar malam anugrah keterbukaan publik (KI Award) Tahun 2020, pada tanggal 7 Desember 2020 di Hotel Grand Daffam Surabaya. Acara malam anugrah keterbukaan publik merupakan rangkaian akhir dari proses monitoring dan evaluasi (Monev) Badan Publik di Jawa Timur.

Berikut daftar penerima penghargaan Monev Badan Publik Tahun 2020 :

1. Penyedia layanan informasi terbaik OPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
2. Badan publik menuju informatif (kategori B, nilai 80-96) OPD Pemerintah Jawa Timur : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

## BAB V

### Rencana Tindak Lanjut

PPID Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk terus menerus memperbaiki pelayanan informasi publik di tahun mendatang. Berikut ini rekomendasi rencana Tindak Lanjut yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas PPID sesuai arahan Ibu Gubernur Jawa Timur, PPID sebagai media humas, pengaduan dan informasi data. Sehingga kualitas Website dan media sosial Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur lebih di tingkatkan.
2. Meningkatkan koordinasi dengan seksi penghasil informasi agar dapat mempercepat dalam merespon dan dapat segera memberikan permintaan informasi publik ke pejabat pengelola informasi dan dokumentasi mengingat waktu yang sangat terbatas untuk disampaikan kepada permohonan informasi.
3. Mendorong adanya tanggungjawab dalam memenuhi dokumen publik
4. Informasi publik yang di upload di Website lebih sering di update sesuai regulasi yang ada, dengan meningkatkan sarana, prasarana dan system informasi untuk mendukung kualitas layanan informasi
5. Tata Kelola penyimpanan dokumen dan arsip serta penyebarluasan informasi publik lebih tertib

Tabel 1.1. DIP PPID Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020

NO	NAMA/JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT, UNIT, DAN SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANG GUNJA WAB PEMBUA TAN/PEN ERBITAN INFORMASI SI	WAKTU DAN TEMPAT NERBITAN/PE NERBITAN INFORMASI	BENTUK YANG TERSEDIA	Masa Retensi
A	SEKRETARIAT	3	4	5	6	7	8
1	<b>PERATURAN</b>						
1	a	Peraturan Pemerintah Nomor 53/2010 tentang Disiplin PNS	mengatur tentang ketentuan Disiplin PNS beserta jenis hukumannya	Subbag Tata Usaha Dinas Kesehatan Prov jatim	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Jakarta Tahun 2010	Disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku
b	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai negeri Sipil	mengatur tentang penilaian kinerja berdasarkan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perlaku PNS	Subbag Tata Usaha Dinas Kesehatan Prov jatim	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Jakarta Tahun 2019	Disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku	
c	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedekapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil	mengatur tentang penghitungan Gaji Pegawai Negeri Sipil	Subbag Tata Usaha Dinas Kesehatan Prov jatim	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Jakarta Tahun 2019	Disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku	
d.	Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan PP No. 53/ 2010 tentang Disiplin PNS	mengatur tentang ketentuan ketentuan pelaksanaan PP No. 53/ 2010 tentang Disiplin PNS	Subbag Tata Usaha Dinas Kesehatan Prov jatim	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Jakarta Tahun 2010	Disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku	

e.	Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi.	mengatur tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	Subbag Tata Usaha Dinas Kesehatan Prov jatim	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Jakarta Tahun 2019	Softcopy	Disediakan dengan Peraturan yang berlaku
f	Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 74/2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	mengatur tentang SOTK Dinkes Jatim	Subbag Tata Usaha Dinas Kesehatan Prov jatim	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Surabaya Tahun 2016	Softcopy	Disediakan dengan Peraturan yang berlaku
g	Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 56/2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	mengatur tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Subbag Tata Usaha Dinas Kesehatan Prov jatim	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Surabaya Tahun 2018	Softcopy	Disediakan dengan Peraturan yang berlaku
e.	Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 128 Tahun 2018 tentang Manajemen Kinerja Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur	mengatur tentang Manajemen Kinerja Pegawai terkait dengan pemberian TPP Prestasi Kerja PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Subbag Tata Usaha Dinas Kesehatan Prov jatim	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Surabaya Tahun 2018	Softcopy	Disediakan dengan Peraturan yang berlaku
2	<b>PROFIL BADAN PUBLIK</b>						
a	RENSTRA 2019-2024	Informasi tentang alamat kantor dinas kesehatan Prov Jatim, Ruang lingkup Kegiatan, Visi dan misi, tujuan, sasaran, Strategi & kebijakan, Tugas & fungsi, Struktur Organisasi	Seksi Penyusunan Program dan Anggaran, Dinas Kesehatan Prov Jatim	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	4 Tahun sekali atau setiap ada perubahan struktur organisasi, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Hard copy & soft copy	5 Tahun
b.	Profil singkat pejabat struktural Tahun 2020	Informasi tentang nama Pejabat eselon IV, III, dan II beserta tugas pokok dan fungsinya di lingkungan Dinas Kesehatan Prov Jatim, Latar	Subbag Tata Usaha Dinas Kesehatan Prov jatim	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi	Minimal 1 Tahun sekali atau setiap ada perubahan pejabat	Softcopy	1 Tahun disesuaikan dengan

		belakang pendidikan, penghargaan yang diterima	Jawa Timur	kondisi Lapangan
3	<b>RINGKASAN PROGRAM DAN KEGIATAN</b>			
a	Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019	Informasi tentang rekapitulasi nama program dan/atau kegiatan, jumlah anggaran, sumbernya, target capaian, penanggungjawab dan jadwal pelaksanaan	Sub Bag Penyusunan Program dan Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Prov Jatim	1 Tahun sekali, Dinas Kesehatan Prov Jatim
b	Tata cara dan syarat usulan kenaikan jenjang jabatan bagi jabatan fungsional tertentu	informasi mengenai tata cara dan syarat usulan kenaikan jenjang jabatan bagi JFT kesehatan	Subbag Tata Usaha Dinas Kesehatan Prov jatim	Hardcopy & Softcopy Dinas Kesehatan Povinsi Jawa Timur bulan Januari dan Juli
c	Tata cara dan syarat usulan tugas belajar dan ijin belajar	informasi mengenai tata cara dan syarat usulan tugas belajar dan ijin belajar serta surat keterangan ijin belajar	Subbag Tata Usaha Dinas Kesehatan Prov jatim	Hardcopy & Softcopy Dinas Kesehatan Povinsi Jawa Timur
d.	Tata cara dan syarat usulan pensiun dan Layanan Klaim Otomatis ke Taspen	informasi mengenai tata cara dan syarat usulan pensiun bagi pensiun BUP, janda/duda, dan pensiun atas permintaan sendiri	Subbag Tata Usaha Dinas Kesehatan Prov jatim	Hardcopy & Softcopy Dinas Kesehatan Povinsi Jawa Timur
e.	Tata cara dan syarat usulan Satyalencana	informasi mengenai tata cara dan syarat usulanSatyalencana bagi PNS yang sudah memiliki masa kerja 10, 20 dan 30 tahun	Subbag Tata Usaha Dinas Kesehatan Prov jatim	Hardcopy & Softcopy Dinas Kesehatan Povinsi Jawa Timur

f	Tata cara dan syarat usulan Kenaikan Gaji Berkala	informasi mengenai tata cara dan syarat usulan kenaikan gaji berkala	Subbag Tata Usaha Dinas Kesehatan Prov jatim	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Hardcopy & Softcopy	1 Tahun disesuaikan dengan kondisi Lapangan
g	Daftar kelompok budaya kerja Dinas dan UPT	Nama, judul, dan uraian risalah kelompok budaya kerja yang dibentuk di Dinas Kesehatan Prov Jatim dan UPT	Subbag Tata Usaha Dinas Kesehatan Prov jatim	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Hardcopy & Softcopy	1 Tahun disesuaikan dengan kondisi Lapangan
<b>4 INFORMASI PENGADAAN</b>						
a.	Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun 2020	Informasi tentang Pengumuman Pengadaan Barang & Jasa di Lingkungan Dinas Kesehatan Prov Jatim	Subbag Keuangan Dinas Kesehatan Prov jatim	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Setiap ada proses pengadaan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Hardcopy di papan pengumuman Dinas Kesehatan Prov Jatim dan situs resmi <a href="http://dinkesjatimprov.go.id">http://dinkesjatimprov.go.id</a>
b.	Ringkasan Laporan Pengadaan Barang & Jasa tahun 2019	Informasi tentang nama pengadaan dan penyedia jasanya	Subbag Keuangan Dinas Kesehatan Prov jatim	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Diterbitkan di Dinas Kesehatan Prov Jatim	Hardcopy dan Soft Copy
c	Daftar Tenaga Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Informasi berisi data tenaga kesehatan yang berada di Dinkes dan UPT	Seksi P3SDMK Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Kabid PSDK Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Diterbitkan di Dinas Kesehatan Prov Jatim	Softcopy

d.	Daftar Tenaga Bidan, dokter/dokter gigi PTT di Provinsi Jawa Timur	Informasi tentang formasi tenaga bidan PTT Pusat, Dokter/Dokter Gigi PTT Pusat yang berada di Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur	Sub Bag Tata Usaha Dinas Kesehatan Prov Jatim	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Tahun 2014, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Softcopy	1 Tahun disesuaikan dengan kondisi Lapangan
<b>5</b>	<b>Daftar SOP</b>						
a	Daftar Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014	Informasi tentang SOP (Standar Operasional Prosedur) program/kegiatan yang dilakukan dari semua Subbag/Seksi di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, yang terdiri dari rama-nama beserta uraian singkat serta pejabat yang menetapkannya	Sub Bag Tata Usaha Dinas Kesehatan Prov Jatim	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Tahun 2014, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Softcopy dan hardcopy	1 Tahun disesuaikan dengan kondisi Lapangan
b	SOP Permohonan Informasi	Informasi tentang prosedur permohonan informasi secara langsung dan tidak langsung	Sub Bag Penyusunan Program dan Anggaran	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Tahun 2014 Dinas Kesehatan Prov Jatim	Hardcopy dan Soft Copy	1 Tahun disesuaikan dengan kondisi Lapangan
c	SOP Pelayanan Keberatan	Informasi tentang prosedur permohonan keberatan secara langsung dan tidak langsung	Sub Bag Penyusunan Program dan Anggaran	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Tahun 2014 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Hardcopy dan Softcopy	1 Tahun disesuaikan dengan kondisi Lapangan
d.	SOP Permohonan pengaduan	Informasi tentang prosedur pengajuan pengaduan	Sub Bag Tata Usaha	Diterbitkan di Dinas Kesehatan Prov Jatim	Diterbitkan di Dinas Kesehatan Prov Jatim	Hardcopy dan Softcopy	1 Tahun disesuaikan dengan kondisi Lapangan
e.	SOP Penanganan Pengaduan	Informasi tentang tata cara memberikan layanan pengaduan	Sub Bag Tata Usaha	Diterbitkan di Dinas Kesehatan Prov Jatim	Diterbitkan di Dinas Kesehatan Prov Jatim	Hardcopy dan Softcopy	1 Tahun disesuaikan dengan kondisi Lapangan

	<b>RINGKASAN KINERJA</b>						
6	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2019	Laporan Pertanggungjawaban kepada stakeholder untuk memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 yang mengamanatkan setiap instansi pemerintah/lembaga negara yang dibayai dari Anggaran Negara agar menyampaikan laporan dimaksud. Secara eksternal, LAKIP merupakan alat kendali, alat penilaian kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah dalam rangka menuju terwujudnya good governance. Sedangkan secara internal, LAKIP merupakan salah satu alat evaluasi untuk memacu peningkatan kinerja setiap unit yang ada di lingkungan instansi tersebut.	Tim pengelola SAKIP berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Prov Jatim	Sub Bag PPA Dinas Kesehatan Prov Jatim	Februari, tahun+1 Dinas Kesehatan Prov Jatim	Hardcopy & Soft Copy	1 Tahun disesuaikan dengan kondisi Lapangan
b	Ringkasan LKPJ (laporan Kejra Pertanggungjawaban) 2019	Laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD LKPJ mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007	Tim Manajemen Data Kesehatan	Sub Bag PPA Dinas Kesehatan Prov Jatim	Januari, Tahun+1, di Dinas Kesehatan Prov Jatim	Hardcopy & Soft Copy	1 Tahun disesuaikan dengan kondisi Lapangan
c	Ringkasan Laporan Tahunan 2018	Laporan berkala setiap tahun yang berisi tentang pelaksanaan tugas dan fungsi perkembangan dan hasil yang dicapai oleh setiap unit kerja yang mencakup resume kegiatan, perbandingan target dan capaian, upaya terobosan/inovasi, serta sumber daya yang dimiliki.	Pengelola Program	Sub Bag PPA Dinas Kesehatan Prov Jatim	April, 1 Tahun sekali di Dinas Kesehatan Prov Jatim	Hardcopy & Soft Copy	1 Tahun disesuaikan dengan kondisi Lapangan
d	Unit Kerja Gubernur Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKGP3) / Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).	Laporan realisasi keuangan dan capaian kinerja program yang dibuat setiap triwulan.	Tim Manajemen Data Kesehatan	Sub Bag PPA Dinas Kesehatan Prov Jatim	Diterbitkan bulan 3 di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Hardcopy & Soft Copy	1 Tahun disesuaikan dengan kondisi Lapangan

7 LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK					
a	Laporan permohonan Informasi	Informasi tentang Jumlah Permintaan informasi; Waktu yang diperlukan dalam memenuhi permintaan informasi; Jumlah permintaan informasi yang dikabulkan atau ditolak dan alasan penolakan informasi	Sub Bag PPA Dinas Kesehatan Prov Jatim	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	6 Bulan, Dinas Kesehatan Prov Jatim
b	Daftar Informasi Publik	Informasi yang dikusasi oleh PPID Pembantu Dinkes Prov Jatim	Sub Bag PPA Dinas Kesehatan Prov Jatim	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Softcopy & Hardcopy 1 Tahun disesuaikan dengan kondisi Lapangan
c	Daftar kewenangan penangganan pangaduan	Informasi tentang batasan kewenangan pengaduan yang dilayani atau tidak	Sub Bag Tata Usaha	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	1 Tahun disesuaikan dengan kondisi Lapangan
<b>B BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT</b>					
1	PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli remaja)	PKPR adalah pelayanan kesehatan yang ramah remaja	Seksi KGM Program ARU Dinkes Prov Jatim	Seksi KGM Tahun 2019	- Leaflet - X Benner Berkelanjutan
<p><b>Prinsip Pelayanan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menjaga kerahasiaan klien remaja !!</li> <li>•Prosedur pelayanan sesederhana mungkin</li> <li>•Ada layanan konseling untuk curhatnya remaja</li> <li>•Remaja terlibat dalam PKPR melalui konselor sebaya</li> <li>•Jam pelayanan disesuaikan dengan kebutuhan remaja</li> <li>•Petugasnya baik, sabar dan ramah (WOW GITU LOH...)</li> </ul> <p><b>Lokasi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•PKPR didalam gedung Puskesmas (poli PKPR)</li> <li>•PKPR diluar gedung Puskesmas (panti, lapas anak, UKS/Usaha Kesehatan Sekolah, dll)</li> </ul> <p><b>Jenis Pelayanan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Promotif : Komunikasi Edukasi, Konselor Sebaya</li> <li>•Preventif : PKHS atau ketramplian sosial</li> <li>•Kuratif&amp; rehabilitatif : konseling, pengobatan, laboratorium, rujukan</li> </ul>					

	Masalah yang dapat ditangani : <ul style="list-style-type: none"> <li>•Masalah gizi</li> <li>•Masalah pubertas</li> <li>•Kesehatan reproduksi</li> <li>•Kekerasan terhadap anak</li> <li>•Masalah depresi, cemas berlebih, kesulitan belajar, masalah perilaku seksual, ingin bunuh diri, gangguan emosi, kecanduan gadget, penyalahgunaan NAPZA&amp;rokok, dll.....</li> </ul>					Berkelanjutan
2	Aplikasi BUAIAN	Aplikasi BUAIAN berfungsi sebagai sarana konsultasi kesehatan ibu dan anak bagi masyarakat yang membutuhkan	Seksi KGM Program KIA Dinkes Prov Jatim	Koordinator Program KIA Dinkes Prov Jatim	Seksi KGM Tahun 2019	Media konsultasi melalui chatting dengan dokter spesialis melalui aplikasi BUAIAN
3	Buku Pedoman Umum Pelaksanaan GERMAS	Indonesia telah mengalami pola perubahan penyakit yang ditandai dengan meningkatnya kemaritipan akibat penyakit tidak menular ( PTM ). Melalui Inpres No 1 tahun 2017 semua Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah menentukan Kebijakan GERMAS sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan masing masing untuk melakukan tahap tahap kegiatan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara berjirang.	Kepala Seksi Promkes dan PM	Kepala Seksi Promkes dan PM	Tahun 2020	Softcopy dan Hardcopy
4	Roll Banner GERMAS	Beriisi tentang informasi 3 kegiatan umum GERMAS yaitu aktifitas fisik, makan sayur dan buah, cek kesehatan secara berkala.	Kepala Seksi Promkes dan PM	Kepala Seksi Promkes dan PM	Tahun 2019, 2020	Softcopy
5	Tempat makan " isi Piringku "	Informasi porsi makan dalam satu piring sebagai pengganti konsep 4 sehat 5 sempurna yang selama ini diketahui masyarakat, yang berisi makanan pokok 2/3 dari 1/2 piring, lauk pauk 1/3 dari 1/2 piring, sayur 2/3 dari 1/2 piring	Kepala Seksi Promkes dan PM	Kepala Seksi Promkes dan PM	Tahun 2019	Softcopy

6	<b>Poster : Etika batuk, Ayo Cegah Penularan COVID - 19, Cegah penularan COVID - 19 melalui PHBS</b>	Berisi informasi tentang etika batuk yang benar, perilaku yang benar untuk mencegah penularan COVID - 19	Kepala Seksi Promkes dan PM	Kepala Seksi Promkes dan PM	2020	Softcopy	1 Tahun disesuaikan dengan kondisi Lapangan
7	<b>Balihooooo R di tempat kerja, Etika batuk yang benar dan cegah corona - 19 melalui PHBS</b>	Informasi tentang perilaku etika batuk yang benar, perilaku yang harus dibudayakan di tempat kerja dan jenis jenis perilaku PHBS untuk mencegah penularan COVID - 19	Kepala Seksi Promkes dan PM	Kepala Seksi Promkes dan PM	2020	Softcopy	1 Tahun disesuaikan dengan kondisi Lapangan
8	<b>Penyebarluasan Informasi Kesehatan melalui RADIO</b>	Informasi program kesehatan prioritas yang dipublikasikan melalui RADIO dengan jangkauan Gerbang kertasusila	Kepala Seksi Promkes dan PM	Kepala Seksi Promkes dan PM	2020 ( TB II )	Softcopy	1 Tahun disesuaikan dengan kondisi Lapangan
9	<b>Penyebarluasan informasi kesehatan melalui media sosial YouTube</b>	Informasi program kesehatan prioritas yang akan disebarluaskan melalui media sosial youtube	Kepala Seksi Promkes dan PM	Kepala Seksi Promkes dan PM	2020 ( TB II )	Softcopy dan Hardcopy	1 Tahun disesuaikan dengan kondisi Lapangan
10	<b>Penyebarluasan informasi kesehatan di terminal Bus Antar Kota</b>	Informasi program kesehatan prioritas yang akan ditampilkan di area terminal Bus Antar Kota ( Rencana term Bungurasih dan Malang )	Kepala Seksi Promkes dan PM	Kepala Seksi Promkes dan PM	2020 ( TB II dan III )	Softcopy	1 Tahun disesuaikan dengan kondisi Lapangan
11	<b>Kampanye Kesehatan melalui Media Cetak Koran Timur</b>	Informasi program kesehatan yang dipublikasikan melalui koran jangkauan Jawa Timur	Kepala Seksi Promkes dan PM	Kepala Seksi Promkes dan PM	2020 ( TB II )	Hardcopy	1 Tahun disesuaikan dengan kondisi Lapangan
12	<b>Program UKBM On TV</b>	kegiatan ini untuk meliput kegiatan kegiatan UKBM unggulan / berprestasi seperti Desa Siaga, Poskestren dan Saka Bakti Husada dan akan dipublikasikan untuk masyarakat	Kepala Seksi Promkes dan PM	Kepala Seksi Promkes dan PM	2020 ( II dan III )	Softcopy	1 Tahun disesuaikan dengan kondisi Lapangan
13	<b>Kampanye Kesehatan melalui media Elektronik TV</b>	Penayangan ulang video Creativ Health campaign sebanyak 12 kl dengan tema tema yang akan ditentukan ( menyusul )	Kepala Seksi Promkes dan PM	Kepala Seksi Promkes dan PM	2020 ( II dan III )	Softcopy	1 Tahun disesuaikan dengan

			Promkes dan PM	Kementeri an Kesehatan Republik Indonesia	2020/RS Rujukan	Hard copy/Soft Copy		Kondisi Lapangan
14	Alur Rujukan Pasien Covid - 19 di Jawa Timur	Program pelayanan pasien covid -19 dalam memperoleh pelayanan kesehatan	Bidang Pelayanan Kesehatan, Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kementeri an Kesehatan Republik Indonesia	2020/RS Rujukan	Hard copy/Soft Copy		sesuai ketentuan
15	Tata Laksana Pembiayaan Penanganan Covid - 19	Program pembiayaan dalam rangka pelayanan kesehatan bagi pasien covid - 19 di Jawa Timur	Bidang Pelayanan Kesehatan, Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kementeri an Kesehatan Republik Indonesia	2020/RS Rujukan	Hard copy/Soft Copy/online		sesuai ketentuan
16	Surveilans dan Respon	Dalam rangka peningkatan pengetahuan masyarakat tentang status pasien covid - 19 yang meliputi Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Orang Dalam Pengawasan (ODP), Orang Tanpa Gejala (OTG), Kontak Erat (KE), Pasien Konfirmasi Masyarakat diharapakan mengetahui masing-masing definsi.	Bidang Pelayanan Kesehatan, Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	2020 / institusi terkait	Hard copy/Soft Copy/online		sesuai ketentuan
17	Manajemen Klinis	Manajemen klinis ditujukan bagi tenaga kesehatan yang merawat pasien ISPA berat baik dewasa dan anak di rumah sakit ketika dicurigai adanya infeksi COVID-19. Bab manifestasi klinis ini tidak untuk menggantikan penilaian klinis atau konsultasi spesialis, melainkan untuk mempermudah manajemen klinis pasien berdasarkan rekomendasi WHO terbaru. Rekomendasi WHO berasal dari publikasi yang merujuk pada pedoman berbasis bukti termasuk rekomendasi dokter yang telah merawat pasien SARS, MERS atau influenza berat	Bidang Pelayanan Kesehatan, Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Rumah Sakit Rujukan	2020/Rumah Sakit Rujukan	Hard copy/Soft Copy		sesuai ketentuan

18	Kegiatan Surveilans dan Karantina	Upaya surveilans merupakan pemantauan yang berlangsung terus menerus terhadap kelompok berisiko. Sedangkan karantina merupakan pembatasan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu wilayah termasuk wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Kegiatan surveilans merupakan bagian tidak terpisahkan dari karantina, selama masa karantina, surveilans dilakukan untuk memantau perubahan kondisi seseorang atau sekelompok orang.	Bidang Pelayanan Kesehatan Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	2020 / Dinas Kesehatan Kab/Kota
19	Deteksi Dini dan Respon Kegiatan	<p>Deteksi Dini dan Respon Kegiatan deteksi dini dan respon dilakukan di pintu masuk dan wilayah untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya OTG, ODP, PDP maupun kasus konfirmasi COVID-19 dan melakukan respon adekuat. Upaya deteksi dini dan respon dilakukan sesuai perkembangan situasi COVID-19 dunia yang dipantau dari situs resmi WHO atau melalui situs lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Situs resmi WHO (<a href="https://www.who.int">https://www.who.int</a>) untuk mengetahui negara terjangkit dan wilayah yang sedang terjadi KLB COVID-19.</li> <li>Sumber lain yang terpercaya dari pemerintah</li> </ul> <p>www.infeksiemerging.kemkes.go.id, www.covid19.kemkes.go.id, www.covid19.go.id dan lain-lain.</p> <p>• Sumber media cetak atau elektronik nasional untuk mewaspadai rumor atau berita yang berkembang terkait dengan COVID-19.</p>	<p>Bidang Pelayanan Kesehatan Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan</p>	<p>Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur</p>	<p>2020/Dinas Kesehatan Kab/Kota</p>

20	Deteksi Dini dan Respon Wilayah	Deteksi dini di wilayah dilakukan melalui peningkatan kegiatan surveilans rutin dan surveilans berbasis kejadian yang dilakukan secara aktif maupun pasif. Kegiatan ini dilakukan untuk menemukan adanya indikasi OTG, ODP, dan PDP COVID-19 yang harus segera direspon. Adapun bentuk respon dapat berupa verifikasi, rujukan kasus, investigasi, notifikasi, dan respon penanggulangan. Bentuk kegiatan verifikasi dan investigasi adalah penyelidikan epidemiologi. Sedangkan, kegiatan respon penanggulangan antara lain identifikasi dan pemantauan kontak, rujukan, komunikasi risiko dan pemutusan rantai penularan.	Bidang Pelayanan Kesehatan, Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	2020 / Dinas Kesehatan Prov. Jatim	Hard copy/lisan	Sesuai ketentuan
<b>C BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT</b>							
1	<b>PERATURAN</b>		Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Jakarta, 17 Maret 2010	Softcopy	Disediakan dengan Peraturan yang berlaku
a	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 374/MENKES/PER/III/2010 tentang Pengendalian Vektor	Berisi tentang pengaturan penyelenggaraan, perizinan, pembinaan, peran serta masyarakat, monev serta pembinaan dan pengawasan					
b	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangan	Berisi tentang penetapan jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah, tata cara penetapan dan pencabutan penetapan daerah KLB/wabah, tata cara penanggulangan dan tata cara pelaporan	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Jakarta, 12 Oktober 2010	Softcopy	Disediakan dengan Peraturan yang berlaku
a	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 21 tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV / AIDS	Berisi tentang penanggulangan HIV dan AIDS secara komprehensif dan berkesinambungan yang terdiri atas promosi kesehatan, pencegahan, diagnosis,	Seksi Pencegahan dan Pengendalian	Kementerian Kesehatan	Jakarta, 21 Maret 2013	Softcopy	Disediakan dengan Peraturan yang berlaku

		pengobatan dan rehabilitasi terhadap individu, keluarga, dan masyarakat	Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Republik Indonesia	<i>Softcopy</i>	Disediakan dengan Peraturan yang berlaku
<b>b</b>	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 51 tahun 2013 tentang Pedoman Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak	Berisi tentang acuan tenaga kesehatan, pengelola program, kelompok profesi dan pemangku kepentingan terkait pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kementeria n Kesehatan Republik Indonesia	Jakarta, 21 Maret 2013	<i>Softcopy</i>
<b>a</b>	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling dan Tes HIV	Pedoman Pelaksanaan Konseling dan Tes HIV wajib menjadi acuan bagi tenaga kesehatan, pengelola program, kelompok profesi yang menjadi konselor HIV, pengelola/ pengurus tempat kerja, dan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam penyelegaraan Konseling dan Tes HIV	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kementeria n Kesehatan Republik Indonesia	Jakarta, 17 Oktober 2014	<i>Softcopy</i>
<b>b</b>	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 82 tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular	Berisi tentang penetapan kelompok dan jenis Penyakit Menular, penyelenggaraan, sumber daya kesehatan, koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan, peran serta masyarakat, penelitian dan pengembangan, pemantauan dan evaluasi, pencatatkan dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan.	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kementeria n Kesehatan Republik Indonesia	Jakarta, 17 Oktober 2015	<i>Softcopy</i>
<b>a</b>	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengobatan Antiretroviral	Pengobatan ARV merupakan bagian dari pengobatan HIV dan AIDS untuk mengurangi risiko penularan HIV, menghambat perburukan infeksi oportunistik, meningkatkan kualitas hidup penderita HIV, dan menurunkan jumlah virus (viral load) dalam darah sampai tidak terdeteksi	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kementeria n Kesehatan Republik Indonesia	Jakarta, 11 November 2014	<i>Softcopy</i>

		Berisi tentang penanggulangan hepatitis virus (upaya promkes, deteksi dini, surveilans, penanganan/p'obatan)	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kementeria n Kesehatan Republik Indonesia	Jakarta, 15 Juli 2015	Softcopy	Disediakan dengan Peraturan yang berlaku
<b>a</b>	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberculosis	Berisi tentang upaya penanggulangan tuberculosis (promkes, surveilans TB, pengendalian faktor risiko, penemuan dan penanganan kasus TB, pemberian kekebalan dan pemberian obat pencegahan)	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kementeria n Kesehatan Republik Indonesia	Jakarta, 22 Desember 2016	Softcopy	Disediakan dengan Peraturan yang berlaku
<b>b</b>	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2017 tentang Eradikasi Frambusia	Berisi tentang upaya intensifikasi kegiatan Penanggulangan Frambusia	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kementeria n Kesehatan Republik Indonesia	Jakarta, 25 Januari 2017	Softcopy	Disediakan dengan Peraturan yang berlaku
<b>a</b>	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2017 tentang Eliminasi Penularan HIV, Sifilis dan Hepatitis dari Ibu ke Anak	Berisi tentang upaya eliminasi PPIA (penetapan dan pelaksanaan strategi Eliminasi Penularan, penetapan dan pelaksanaan peta jalan dan intensifikasi kegiatan Eliminasi Penularan)	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kementeria n Kesehatan Republik Indonesia	Jakarta, 13 November 2017	Softcopy	Disediakan dengan Peraturan yang berlaku
<b>b</b>	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu	Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib menerapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Kementeria n Kesehatan Republik Indonesia	Jakarta, 15 Januari 2019	Softcopy	Disediakan dengan Peraturan yang berlaku

	Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan	Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kementeria n Kesehatan Republik Indonesia	Softcopy	Disediakan dengan Peraturan yang berlaku
<b>a</b>	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kusta	Berisi tentang penanggulangan kusta melalui upaya pencegahan dan pengendalian melalui kegiatan promosi kesehatan, surveilans, kemoprofilaksis dan tata laksana penderita kusta	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Jakarta, 18 April 2019	Softcopy
<b>b</b>	Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue di Provinsi Jawa Timur	Berisi tentang karakteristik dan cara penularan DBD, upaya pengendalian, pencegahan, surveilans, pengaspalan, larvasidasi, penaganan penderita, KLB DBD, pokjanal, PSM dan pelaporan pembinaan pengawasan	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Surabaya, 22 November 2011	Softcopy
<b>a</b>	Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS	sebagai dasar kebijakan pemerintah daerah dalam mengurangi penularan HIV dan meningkatkan kualitas hidup ODHA	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Surabaya, 28 Desember 2018	Softcopy
<b>b</b>	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.01.07/Menkes/90/2019 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana HIV	PNPK HIV merupakan pedoman bagi dokter sebagai pembuat keputusan klinis di fasilitas pelayanan keSehatan, institusi pendidikan, dan kelompok profesi terkait	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Jakarta, 19 Februari 2019	Softcopy

<b>c</b>	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/322/2019 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Hepatitis B	PNPK Hepatitis B merupakan pedoman bagi dokter sebagai pembuat keputusan klinis di fasilitas pelayanan kesehatan, institusi pendidikan, dan kelompok profesi terkait	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kementeria n Kesehatan Republik Indonesia	Jakarta, 10 Juni 2019	Softcopy	Disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku
<b>d</b>	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/681/2019 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Hepatitis C	PNPK Hepatitis C merupakan pedoman bagi dokter sebagai pembuat keputusan klinis di fasilitas pelayanan kesehatan, institusi pendidikan, dan kelompok profesi terkait	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kementeria n Kesehatan Republik Indonesia	Jakarta, 18 Oktober 2019	Softcopy	Disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku
<b>e</b>	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/755/2019 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Tuberkulosis	PNPK Tuberkulosis merupakan pedoman bagi dokter sebagai pembuat keputusan klinis di fasilitas pelayanan kesehatan, institusi pendidikan, dan kelompok profesi terkait	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kementeria n Kesehatan Republik Indonesia	Jakarta, 02 Desember 2019	Softcopy	Disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku
<b>f</b>	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/813/2019 tentang Formularium Nasional	merupakan daftar obat terpilih yang dibutuhkan dan digunakan sebagai acuan penulisan resep pada pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan.	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kementeria n Kesehatan Republik Indonesia	Jakarta, 31 Desember 2019	Softcopy	Disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku
<b>2</b>	<b>RINGKASAN PROGRAM DAN KEGIATAN</b>						Disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku

a	Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik	Ada 8 kab/ko yang sudah mempunyai SK G1R1J sebagai bentuk implementasi G1R1J	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Prov Jatim	Diterbitkan di Dinas Kesehatan Kab/Kota	Softcopy Disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku
b	Investasi Kontak Erat	1 pasien tuberkulosi (TB) yang terkonfirmasi bakteriologis, dicari minimal 20 kontak erat, sudah dilaksanakan di 38 kab/kota	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kepala Bidang Pencegaha n dan Pengendali an Penyakit Dinkes Prov Jatim	Diterbitkan di Dinas Kesehatan Kab/Kota	Softcopy Disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku
c	Intensifikasi penemuan kasus kusta baru ( <i>Intesified Case Finding</i> )	Pencarian penderita kusta baru di lokus endemis kusta dengan melibatkan kepala keluarga dan kader kesehatan di 12 kab (Sumenep, Pamekasan, Sampang, Bangkalan, Situbondo, Probolinggo, Lumajang, Pasuruan, Tuban, Lamongan, Gresik, Jember)	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kepala Bidang Pencegaha n dan Pengendali an Penyakit Dinkes Prov Jatim	Diterbitkan di Dinas Kesehatan Kab/Kota	Softcopy Disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku
3	PENYAKIT MENULAR					Disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku
a	Waspadai Penyakit HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Informasi tentang Pengertian, Gejala, Cara Penularan, Dampak/Akibat, Daerah Persebaran, Upaya yang telah dilakukan dan Cara Pencegahan Penyakit HIV AIDS dan IMS	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kepala Bidang Pencegaha n dan Pengendali an Penyakit Dinkes Prov Jatim	Diterbitkan di Dinas Kesehatan Prov Jatim	Softcopy Disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku

b	Waspada Penyakit KUSTA	Informasi tentang Pengertian, Gejala, Cara Penularan, Dampak/Akibat, Daerah Persebaran, Upaya yang telah dilakukan dan Cara Pencegahan Penyakit Kusta	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Prov Jatim	Diterbitkan di Dinas Kesehatan Prov Jatim	Softcopy	Disediakan dengan Peraturan yang berlaku
c	Waspada Penyakit TB	Informasi tentang Pengertian, Gejala, Cara Penularan, Dampak/Akibat, Daerah Persebaran, Upaya yang telah dilakukan dan Cara Pencegahan Penyakit TB	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Prov Jatim	Diterbitkan di Dinas Kesehatan Prov Jatim	Softcopy	Disediakan dengan Peraturan yang berlaku
d	Waspada Penyakit DEMAM BERDARAH	Informasi tentang Pengertian, Gejala, Cara Penularan, Dampak/Akibat, Daerah Persebaran, Upaya yang telah dilakukan dan Cara Pencegahan Penyakit Demam Berdarah	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Prov Jatim	Diterbitkan di Dinas Kesehatan Prov Jatim	Softcopy	Disediakan dengan Peraturan yang berlaku
e	Waspada Penyakit ISPA	Informasi tentang Pengertian, Gejala, Cara Penularan, Dampak/Akibat, Daerah Persebaran, Upaya yang telah dilakukan dan Cara Pencegahan Penyakit ISPA	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Prov Jatim	Diterbitkan di Dinas Kesehatan Prov Jatim	Softcopy	Disediakan dengan Peraturan yang berlaku
f	Waspada Penyakit DIARE	Informasi tentang Pengertian, Gejala, Cara Penularan, Dampak/Akibat, Tata Laksana Diare dan Cara Pencegahan Penyakit Diare	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Diterbitkan di Dinas Kesehatan Prov Jatim	Softcopy	Disediakan dengan Peraturan yang berlaku

			Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	an Penyakit Dinkes Prov Jatim			
g	Waspada Penyakit TYPHOID	Informasi tentang Pengertian, Gejala, Cara Penularan, Dampak/Akibat, Upaya yang telah dilakukan dan Cara Pencegahan Penyakit Typhoid	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Diterbitkan di Dinas Kesehatan Prov Jatim	Softcopy	Disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku	
h	Waspada Penyakit HEPATITIS	Informasi tentang Pengertian, Gejala, Cara Penularan, Dampak/Akibat, Upaya yang telah dilakukan dan Cara Pencegahan Penyakit Hepatitis (A, B dan C)	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Diterbitkan di Dinas Kesehatan Prov Jatim	Softcopy	Disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku	
i	Waspada Penyakit MALARIA	Informasi tentang Pengertian, Gejala, Cara Penularan, Dampak/Akibat, Daerah Persebaran, Upaya yang telah dilakukan dan Cara Pencegahan Penyakit Malaria	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Diterbitkan di Dinas Kesehatan Prov Jatim	Softcopy	Disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku	
j	Waspada Penyakit LEPTOSPIROSIS	Informasi tentang Pengertian, Gejala, Cara Penularan, Dampak/Akibat, Daerah Persebaran, Upaya yang telah dilakukan dan Cara Pencegahan Penyakit Malaria	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Prov Jatim	Diterbitkan di Dinas Kesehatan Prov Jatim	Softcopy	Disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku	
k	POSBINDU PTM					Disesuaikan dengan	

					Peraturan yang berlaku
1		Postbindu PTM adalah kegiatan pengendalian faktor risiko PTM melalui pemberdayaan masyarakat. Program Postbindu PTM ditujukan kepada seluruh masyarakat sehat dan berisiko yang berusia dari 15 tahun ke atas. Postbindu PTM dapat diselenggarakan dalam sebulan sekali, bila diperlukan dapat lebih dari satu kali dalam sebulan. Hari dan waktu yang dipilih sesuai dengan kesepakatan serta dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Postbindu PTM diperlukan untuk dapat mengendalikan faktor risiko Penyakit Tidak Menular yang terdapat pada setiap individu agar tidak berkembang menjadi Penyakit Tidak Menular.	Dinas Kesehatan Provinsi Bidang P2P Seksi P2PTM dan Keswasa	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Provinsi Jawa Timur	Softcopy
D	BIDANG PELAYANAN KESEHATAN				Satu tahun
1	Kepesertaan JKN penduduk Jawa Timur Tahun 2019	Informasi ini menggambarkan cakupan kepesertaan penduduk Jawa Timur dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/KIS) dari setiap jenis kepesertaan PBI / Non PBI per Kabupaten/Kota	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Jawa Timur	Tribulanan (per tiga bulanan) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Excell
2	Status Akreditasi Puskesmas di Jawa Timur	Informasi ini menggambarkan hasil pelaksanaan survei akreditasi puskesmas yang ada di provinsi Jawa Timur dan status akreditasinya, dasar, madya, utama dan paripurna.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Bidang Pelayanan	Semesteran (per enam bulan) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Excell / Power Point

	Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.	Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur,		
3	Data Keluarga Sehat di Jawa Timur (PIS PK)	Informasi ini menggambarkan hasil kunjungan keluarga, data IKS, presentase keluarga sehat, tidak sehat, pra sehat di Jawa Timur	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, yang diambil dari dashboard aplikasi KS Kementerian Kesehatan RI	Tribulanan (per tiga bulanan) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
4	Jumlah FKTP	Informasi ini menggambarkan jumlah FKTP (puskesmas, pusstu, polindes, ponkesdes) di Jawa Timur	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.	Tahunan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

5	Hasil Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bergerak Tahun 2020	Informasi ini menggambarkan kegiatan Pelayanan Kesehatan Bergerak di Kepulauan dokumentasi, jumlah yang sudah dilayani	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Semesteran (per enam bulan) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Powerpoint, Word	Satu tahun
6	Asuhan Mandiri Pemanfaatan TOGA & Akupresur untuk Mencegah Stunting	<p><b>1. Penyebab stunting adalah kombinasi dari beberapa faktor yaitu :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. asupan makanan yang kurang bergizi dalam waktu yang lama</li> <li>b. pertumbuhan yang tidak baik saat dalam kandungan</li> <li>c. tidak cukup protein dalam proporsi total asupan kalori</li> <li>d. perubahan hormon yang dipicu oleh stres</li> <li>e. sering menderita infeksi diawal kehidupan seorang anak</li> </ul> <p><b>2. Pemanfaatan Asman TOGA dan Akupresur dalam mencegah stunting :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. ramuan dan akupresur untuk meningkatkan nafsu makan</li> <li>b. ramuan untuk anemia</li> <li>c. ramuan dan akupresur untuk meningkatkan produksi ASI</li> <li>d. ramuan dan akupresur untuk meningkatkan daya tahan tubuh</li> </ul>	Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional Kementerian Kesehatan RI	Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI	Brosur	2 hari kerja
7	Asuhan Mandiri Pemanfaatan TOGA & Akupresur untuk Mengatasi Susah Tidur dan Stress	<p><b>akupresur</b> untuk mengatasi stress dapat dilakukan pemijatan pada (1) tiga jari di atas pertengahan pergelangan tangan bagian dalam; (2) lekukan garis pergelangan tangan bagian dalam, segaris dengan jari kelingking; (3) di belakang kepala, 1 ibu jari di atas batas rambut bagian belakang</p>	Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional Kementerian Kesehatan RI	Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional Kementerian Kesehatan RI	Flyer	2 hari kerja

			Kesehatan RI / Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur			
8	Asuhan Mandiri Pemanfaatan TOGA & Akupresur untuk Mengatasi Sakit Kepala / Pusing	ramuan terdiri dari biji pala, madu, dan air panas. Cara pembuatan 1/5 bagian biji pala ditumbuk halus. Seduh dengan 1 cangkir air hangat dan madu 1 sendok makan. Diminum 1-2 kali sehari dalam keadaan hangat	akupresur untuk mengatasai sakit kepala/pusing dapat dilakukan pemijatan pada (1)daerah kepala bagian depan, yang terletak di lekukan tulang pelipis, sejajar dengan sudut mata luar; (2) di belakang kepala, 1 ibu jari tangan dan di atas batas rambut bagian belakang; (3) untuk daerah puncak kepala, dapat dilakukan pemijatan pada lokasi yang terletak di puncak kepala	Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional	Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional I, Kementeri an Kesehatan RI / Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2018 Flyer
9	Asuhan Mandiri Pemanfaatan TOGA & Akupresur untuk Meningkatkan Produksi ASI pada Ibu Menyusui	ramuan terdiri dari bawang putih, pegagan/ antanan dan air. Cara pembuatan bawang putih dimemarkan, campurkan semua bahan kemudian rebus dalam air mendidih selama 10-15 menit dengan api kecil. Diminum 3 kali sehari masing-masing 1/3 gelas. Ramuan hanya untuk dewasa	akupresur untuk meningkatkan produksi ASI dapat dilakukan pemijatan pada (1) perpotongan garis tegak lurus dari sudut kuku bagian kelingking dan (2) terletak 4 jari di bawah tempurung lutut di tepi luar tulang kering	Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional	Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional I, Kementeri an Kesehatan RI / Dinas Kesehatan Provinsi	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2018 Flyer

		Jawa Timur				
	ramuan terdiri temulawak, meniran, pegagan, dan air. Cara pembuatan, campurkan semua bahan kemudian rebus dalam air mendidih selama 10-15 menit dengan api kecil. Diminum 2 kali sehari pagi dan menjelang akupresur untuk meningkatkan daya tahan tubuh	Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional	Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2018	2 hari kerja	
10	Asuhan Mandiri Pemanfaatan TOGA & Akupresur untuk Meningkatkan daya Tahan Tubuh	dapat dilakukan pemijatan pada (1) 4 jari di bawah lutut di tepi luar tulang kering; (2) 4 jari di atas mata kaki bagian dalam. Pijatan ini dilakukan dengan kondisi posisi kaki disilangkan ke atas paha; (3) punggung tangan pada tonjolan tertinggi ketika ibu jari dan telunjuk dirapatkan	I. Kementerian Kesehatan RI / Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur			
	ramuan terdiri dari jahe empit/jahe merah, pegagan, temulawak, gula merah, dan air. Cara pembuatan jahe dan temulawak dimemarkan. Pegagan dan gula merah dipotong kecil-kecil. Semua bahan dicampur dan direbus di dalam air mendidih selama 10-15 menit dengan api kecil. Diminum hangat-hangat 2 kali sehari masing-masing 1 gelas. Ramuan ibu hamil dan sedang mengonsumsi obat pengencer darah	Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2020	Poster/ flayer/ media sosial	2 hari kerja	
11	Ramuan Tradisional untuk Meningkatkan Daya Tahan Tubuh	1. Ramuan infused water kurma dan jahe 2. Ramuan jahe, pandan, dan kencur 3. Ramuan kunyit, jeruk nipis dan madu 4. Ramuan jahe emprit/merah, pegagan dan temulawak 5. Ramuan mengkudu dan madu 6. Ramuan meniran	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2020	Power Point	2 hari kerja
12	Kegiatan Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional	Merupakan sebuah upaya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan mengatasi masalah/gangguan kesehatan	Seksi Pelayanan	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2017		

		ringan secara mandiri oleh individu dalam keluarga, kelompok atau masyarakat, dengan memanfaatkan TOGA dan Keterampilan	Kesehatan Tradisional	Jawa Timur			
E	SUMBER DAYA KESEHATAN	Kagiatan tersebut termasuk dalam pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kelompok asuhan mandiri kestrad					
1	Rekognisi Pembelajaran lampau	Program percepatan pendidikan adalah program akselerasi dalam rangka meningkatkan kualifikasi pendidikan tenaga kesehatan melalui RPL dari jenjang pendidikan menengah (JPM) DAN Diploma I ke Diploma II, sedangkan RPL sendiri definisinya adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, non formal, informal dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia badan PPSDM Kesehatan	2020	Hard copy/Soft Copy	sesuai ketentuan	
2	Tugas Belajar	Dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan lingkungan Kementerian Kesehatan dan UPT nya serta Dinas Kesehatan Daerah dan UPTD nya makan Kementerian Kesehatan melaksanakan penerimaan peserta tugas belajar dalam negeri SDM Kesehatan Tahun 2018 meliputi Program akademik jenjang D-IV, S-1, Profesi, S-2+ Spesialis, S-3 (khusus pendidik klinis dan Widya Iswara)	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia badan PPSDM Kesehatan	2020 / institusi terkait	Hard copy/Soft Copy/online	sesuai ketentuan	
3	PPDS/DGS -BK	Dalam rangka peningkatan akses dan mutu pelayanan medik spesialistik dan sub spesialistik, kemenkes melalui Tim pelaksana dan pengelola program bantuan pendidikan dokter spesialis/drg spesialis melaksanakan penerimaan peserta program bantuan pendidikan dokter spesialis/drg spesialis dan sub spesialis	Bidang SDK seksi SDMK	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia badan PPSDM Kesehatan	2020 / institusi terkait	Hard copy/Soft Copy/online	sesuai ketentuan
4	Tenaga Kesehatan Teladan	Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan diusulkan oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota berasal dari puskesmas yang telah terakreditasi minimal akreditasi madya meliputi 9 kategori yaitu : Dokter, dokter gigi, perawat, bidan, kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, nutrisionis, ahli teknis, lab medik, kefarmasian	Bidang SDK seksi SDMK	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	2020 / Kab-kota yang ditentukan	Hard copy/Soft Copy	sesuai ketentuan

5	PGDS	Pendayagunaan Dokter spesialis adalah penempatan dokter spesialis di RS milik Pemerintah pusat dan pemda, dlm rangka pendayagunaan dr spesialis pemerintah pusat melakukan penempatan dokter spesialis sbg salah satu upaya pemerataan pelayanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.	Bidang SDK seksi SDMK	1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	2020 / wahana yang ditentukan	Hard copy/Soft Copy	sesuai ketentuan
6	Pengurusan STR	Pengurusan untuk legalisir STR	Bidang SDK seksi SDMK	Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	2020	Hard copy/Soft Copy	sesuai ketentuan
7	Jabatan fungsional	Verifikasi Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) yang merupakan salah satu syarat jabatan fungsional Nakes untuk ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan dalam Penetapan Angka Kredit (PAK)	Bidang SDK seksi SDMK	Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	2020 / Dinas Kesehatan Prov. Jatim	Hard copy/lisan	Sesuai ketentuan
8	Uji Kompetensi pergerakan jenjang	Dalam upaya memberikan pengakuan terhadap kompetensi pejabat fungsional kesehatan dan sebagai bahan pertimbangan untuk setiap pergerakan jabatan fungsional yaitu: pengangkatan pertama jabatan fungsional, kenaikan jenjang jabatan fungsional, alih jenjang jabatan dan alih jenjang/alih fungsi maka perlu ada uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan.	Bidang SDK seksi SDMK	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia badan PPSDM Kesehatan Jawa Timur	2020	Hard copy/lisan	sesuai ketentuan
9	Lolos Butuh	Se semua lulusan apoteker jatim yang akan bekerja di luar jatim harus mempunyai surat rekomendasi dari Kadinkes	Bidang SDK seksi SDMK	Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas	2020 / Dinas Kesehatan Prov. Jatim	Hard copy/Soft Copy	sesuai ketentuan

		Kesehatan Provinsi Jawa Timur		
10	Bukti lapor	Surat keterangan lulus sebagai syarat untuk pengurusan lolos butuh	Bidang SDK seksi SDMK	2020 / Dinas Kesehatan Prov. Jatim
11	Koordinasi pelatihan	Pelaksanaan pelatihan dengan sasaran Dinas kesehatan dan Kabupaten/Kota dengan berkoordinasi dengan Pelatihan Kesehatan Masyarakat (Latkesmas)	Bidang SDK seksi SDMK	Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
12	PKP Mahasiswa	Praktek kerja pemerintahan / profesi merupakan salah satu kegiatan pembelajaran, pelatihan dan pelaksanaan praktik dibawah pengawasan pembimbing	Bidang SDK seksi SDMK	2020 / Latkesmas
13	Program Dokter Internship	Kegiatan penempatan dokter yang baru lulus sebagai proses pemantapan mutu profesi dokter yang menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan secara terintegrasi, komprehensif, mandiri dengan berkoordinasi dengan kementerian kesehatan. Dilakukan 4 periode.	Bidang SDK seksi SDMK	Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
14	Penempatan tim dokter spesialis di kepulauan dan koridor madura	Penempatan, Pengembangan dan Pemenuhan Tenaga Kesehatan dalam rangka kunjungan pelayanan kesehatan spesialistik tim dokter spesialis di kepulauan dan koridor madura	Bidang SDK seksi SDMK	Kepala Bidang Sumber Daya

		Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur			
15	Penempatan tim dokter residen di kepulauan dan koridor madura	Penempatan, Pengembangan dan Pemenuhan Tenaga Kesehatan dalam rangka kunjungan pelayanan kesehatan spesialisik tim dokter residen di kepulauan dan koridor madura	Bidang SDK seksi SDMK	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	2020 / RS yang ditentukan
16	Data tenaga kesehatan	Data tentang tenaga kesehatan yang ada di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang ada di Jawa Timur	Bidang SDK seksi SDMK	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	per 3 bulan
17	Izin Pedagang Besar Farmasi	Pengertian, jenis pedagang besar farmasi, tatacara, persyaratan dan ketentuan untuk mendapatkan izin PBF.	Seksi Kefarmasian Bidang SDK Dinkes Prov. Jatim	Kasi Kefarmasia n	Sewaktu-waktu memohon mengajukan pertanyaan di Seksi Kefarmasian

Dasar hukum :

1. Permenkes RI nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi;
2. Permenkes RI nomor 34 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan nomor : 1148/MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi;
3. Permenkes RI nomor 30 tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan nomor : 1148/MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi

4.	Permenkes RI nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan			
5.	Perka BPOM nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan			
18	Izin Produksi Obat Tradisional	Pengertian obat tradisional, ketentuan, tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan izin obat tradisional.	Seksi Kefarmasian Bidang SDK Dinkes Prov. Jatim	Sewaktu-waktu memohon mengajukan pertanyaan di Seksi Kefarmasian
	Dasar hukum:			
	1. Permenkes RI nomor : 006 tahun 2012 tentang : Industri dan Usaha Obat Tradisional;			
	2. Permenkes RI nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan;			
	3. Perka BPOM nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan.			
19	Registrasi Obat Tradisional (Izin Edar)	Pengertian registrasi, Ketentuan, tatacara dan persyaratan nya untuk mendapatkan izin edar.	Seksi Kefarmasian Bidang SDK Dinkes Prov. Jatim	Sewaktu-waktu memohon mengajukan pertanyaan di Seksi Kefarmasian
	Dasar hukum:			
	1. Permenkes RI nomor 007 tahun 2012 tentang : registrasi obat tradisional			
	2. Permenkes RI nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan;			
	3. Perka BPOM nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan.			
20	Izin Industri Kosmetika	Pengertian kosmetika, Ketentuan, tatacara dan Persyaratan untuk mendapatkan izin produksi kosmetika.	Seksi Kefarmasian Bidang SDK	Sewaktu-waktu memohon mengajukan

		Dinkes Prov. Jatim	pertanyaan di Seksi Kefarmasiaan	undangan masih berlaku		
	Dasar hukum :					
21	<p>1. Permenkes RI nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang izin produksi Kosmetika;</p> <p>2. Permenkes RI nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan;</p> <p>3. Perka BPOM nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan.</p>					
	Pengertian kosmetika, Ketentuan, tatacara dan Persyaratan untuk mendapatkan izin edar atau notifikasi.	Seksi Kefarmasian Bidang SDK Dinkes Prov. Jatim	Kasi Kefarmasia n	<p>Sewaktu-waktu pemohon mengajukan pertanyaan di Seksi Kefarmasian</p>		
	Dasar hukum :					
	<p>1. Permenkes RI nomor: 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika;</p> <p>2. Permenkes RI nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan;</p> <p>3. Perka BPOM nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan.</p>					
22	Izin Industri Farmasi	<p>Pengertian Industri Farmasi, Ketentuan, tatacara dan Persyaratan untuk mendapatkan izin Industri.</p>	<p>Seksi Kefarmasian Bidang SDK Dinkes Prov. Jatim</p>	<p>Kasi Kefarmasia n</p> <p>Sewaktu-waktu pemohon mengajukan pertanyaan di Seksi Kefarmasian</p>	<p>Softcopy dan hardcopy (buku, dan banner)</p>	<p>Selama peraturan perundang- undangan masih berlaku</p>
	Dasar hukum :					
	<p>1. Permenkes RI nomor: 1799/MENKES/PER/XII/2010 tentang Industri Farmasi;</p> <p>2. Permenkes RI nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan;</p>					

		3. Perka BPOM nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan.			
23	Pelayanan Kefarmasian	<b>Pelayanan Kefarmasian di Apotek:</b> Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alkes dan BMHP; Pelayanan Farmasi Klinik; Dasar hukum : 1. Permenkes RI nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek; 2. Permenkes RI nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek.	Seksi Kefarmasian Bidang SDK Dinkes Prov. Jatim	Kasi n Kefarmasia	Sewaktu-waktu pemohon mengajukan pertanyaan di Seksi Kefarmasian
		<b>Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas :</b> Pengelolaan Sediaan Farmasi dan BMHP; Pelayanan Farmasi Klinik; Dasar hukum : 1. Permenkes RI nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 2. Permenkes RI nomor 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.			Softcopy dan hardcopy (buku)
		<b>Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit:</b> Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alkes dan BMHP; Pelayanan Farmasi Klinik; Dasar hukum : Permenkes RI nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit			Selama peraturan perundangan undangan masih berlaku
24	Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (GeMa CerMat)	Informasi yang diberikan : Seksi Kefarmasian Bidang SDK Dinkes Prov. Jatim	Kasi n Kefarmasi an	Sewaktu-waktu pemohon mengajukan pertanyaan di Seksi Kefarmasian	Softcopy dan hardcopy (buku)
					Selama peraturan masih berlaku

Penyelenggaraan metode CBIA;					
Penggunaan Obat Rasional meliputi :					
a. Penggolongan obat;					
b. Informasi pada kemasan dan biosur obat;					
c. Cara pemilihan dan mendapatkan obat;					
d. Bentuk sedaan;					
e. Peringatan perhatian;					
f. Dosis obat;					
g. Cara penggunaan obat;					
h. Efek samping obat;					
i. Cara penyimpanan obat;					
j. Obat rusak dan kadaluarsa;					
k. Cara pembuangan obat.					
Tata cara pelaksanaan metode CBIA (tujuan dan tahapan kegiatan)					
Dasar hukum :					
Kepmenkes RI nomor : HK.02.02/MENKES/427/2015 tentang Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat					
Informasi tentang tata laksana keracunan (pencegahan dan pertolongan pertama)	Seksi Kefarmasian Bidang SDK Dinkes Prov. Jatim	Kasi Kefarmasia n	Sewaktu-waktu pemohon mengajukan pertanyaan di Seksi Kefarmasian	Softcopy dan hardcopy (buku)	Selama peraturan perundang- undangan masih berlaku
25	Pelayanan Informasi Keracunan	Informasi yang diberikan meliputi :	Seksi Kefarmasian Bidang SDK Dinkes Prov. Jatim	Kasi Kefarmasia n	Sewaktu-waktu pemohon mengajukan pertanyaan di Seksi Kefarmasian
26	Makanan dan Minuman	Peraturan/ketentuan yang berkaitan dengan makanan dan minuman;	Jenis pangan yang dilizinkan untuk PIRT Jenis Bahan Tambahan Pangan (BTP); Bahan yang dilarang ditambahkan pada makanan; Label kemasan;		Softcopy dan hardcopy (buku)

	Dasar hukum :			
27	1. UU RI nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan; 2. PP nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan; 3. PP nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan; 4. Permenkes RI nomor 033 tahun 2012 : Bahan Tambahan Pangan			
	Informasi yang diberikan meliputi :	Seksi Kefarmasian Bidang SDK Dinkes Prov. Jatim	Kasi Kefarmasia n	Sewaktu-waktu pemohon mengajukan pertanyaan di Seksi Kefarmasian
	Bahaya bahan kimia obat (BKO) yang ditambahkan pada sedaan obat tradisional;			
	Jenis bahan kimia obat (BKO) yang sering ditambahkan pada obat tradisional;			
	Hal-hal yang dilarang dalam pembuatan obat tradisional.			
	Dasar hukum :			
	Permenkes RI nomor 006 tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional.			
28	Informasi yang diberikan meliputi :	Seksi Kefarmasian Bidang SDK Dinkes Prov. Jatim	Kasi Kefarmasia n	Sewaktu-waktu pemohon mengajukan pertanyaan di Seksi Kefarmasian
	Jenis kosmetika yang termasuk golongan A dan golongan B			Softcopy dan hardcopy (buku)
	Bahaya bahan kimia yang dilarang ditambahkan kosmetika.			
	Dasar hukum :			
	Permenkes RI nomor 1175/MENKES/PERM/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika			

29	Obat Publik	Informasi yang diberikan meliputi :	Seksi Kefarmasian Bidang SDK Dinkes Prov. Jatim	Kasi Kefarmasia n	Sewaktu-waktu pemohon mengajukan pertanyaan di Seksi Kefarmasian	Softcopy dan hardcopy (buku)	Selama peraturan masih berlaku
		1. Ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas di Provinsi Jawa Timur;					
		2. Rantai manajemen pengelolaan sediaan farmasi mulai dari bahan baku sampai dengan penggunaan sediaan farmasi oleh pasien.					
30	NAPZA	Informasi yang diberikan meliputi :	Seksi Kefarmasian Bidang SDK Dinkes Prov. Jatim	Kasi Kefarmasia n	Sewaktu-waktu pemohon mengajukan pertanyaan di Seksi Kefarmasian	Softcopy dan hardcopy (buku)	Selama peraturan masih berlaku
		1. Peredaran, penyimpanan, pemusnahan dan pelaporan narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi;					
		2. Penggolongan narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi					
		Dasar hukum :					
		1. UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;					
		2. Permenkes RI nomor 3 tahun 2015 tentang Peredaran, penyimpanan, pemusnahan dan pelaporan narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi;					
		3. Permenkes RI nomor 3 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika;					
		4. Permenkes RI nomor 41 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;					
31	E-Report	Informasi yang diberikan meliputi :	Seksi Kefarmasian Bidang SDK Dinkes Prov. Jatim	Kasi Kefarmasia n	Sewaktu-waktu pemohon mengajukan pertanyaan di Seksi Kefarmasian	Softcopy	Selama peraturan perundangan undangan masih berlaku
		Tata cara dan alur pelaporan obat setiap triwulan di satuan PBF;					

	Tata cara dan alur pelaporan narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi setiap bulan di sarana PBF.					
	Dasar hukum :					
32	1. Permenkes RI nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi; 2. Permenkes RI nomor 3 tahun 2015 tentang Peredaran, penyimpanan, pemusnahan dan pelaporan narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi.	Informasi yang diberikan adalah tata cara dan alur pelaporan narkotika dan psikotropika setiap bulan di sarana pelayanan.	Seksi Kefarmasian Bidang SDK Dinkes Prov. Jatim	Kasi Kefarmasi an	Sewaktu-waktu memohon mengajukan pertanyaan di Seksi Kefarmasian	Softcopy Selama peraturan perundangan undangan masih berlaku
	Dasar hukum :					
33	Permenkes RI nomor 3 tahun 2015 tentang Peredaran, penyimpanan, pemusnahan dan pelaporan narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi.	Laporan hasil survei kepuasan kepada pengunjung Seksi Farmasi maupun Gudang Farmasi. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan melalui link: bit.ly/surveikepuasan-kefarmasian dan bit.ly/surveikepuasan-instfarmasi. Laporan survei kepuasan masyarakat dilakukan setiap 1 bulan dan 3 bulan sekali	Seksi Kefarmasian Bidang SDK Dinkes Prov. Jatim	Kasi Kefarmasia n	Sewaktu-waktu memohon mengajukan pertanyaan di Seksi Kefarmasian	Softcopy Selama peraturan perundangan undangan masih berlaku
	Dasar Hukum:					
34	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Aplikasi Perizinan Sarana Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan Online ini dibangun untuk memfasilitasi layanan publik dalam proses perizinan yang menerbitkan Sertifikat Distribusi Cabang Penyalur Alat Kesehatan (Izin Cabang PAK). Izin sarana produksi dan Distribusi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), dasar hukum:	Softcopy dan haardcopy (buku dan banner) <a href="http://https://p2t.jatimprov.go.id/">http://https://p2t.jatimprov.go.id/</a>			

35		Applikasi Perizinan Sarana Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan Online ini dibangun untuk memfasilitasi layanan publik dalam proses perizinan yang menerbitkan Sertifikat Produksi Alkes dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Izin Penyalur Alat Kesehatan (Izin PAK).	Bidang Sumber Daya Kesehatan Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Kasi Alkes dan PKRT	Softcopy dan haardcopy (buku dan banner) <a href="http://sertifikatalkes.kemkes.go.id/">http://sertifikatalkes.kemkes.go.id/</a>
36	Dasar Hukum:	Aplikasi Registrasi Alat Kesehatan dan PKRT Online ini dibangun untuk memfasilitasi layanan publik dalam proses perizinan yang menerbitkan Sertifikat Produksi Alkes dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Izin Penyalur Alat Kesehatan (Izin PAK). Produk Alat Kesehatan dan PKRT	Sistem informasi berbasis web untuk mengetahui perijinan yang sudah terbit melalui Sistem Registrasi Online yang disebut sebagai Sistem e-Infoalkes. Pengguna portal adalah Kementerian Kesehatan, Perusahaan Produsen serta Penyalur ALKES & PKRT dan masyarakat umum yang ingin mengetahui informasi mengenai perijinan ALKES dan PKRT yang sudah diterbitkan serta mengetahui profil perusahaan yang bergerak di bidang ALKES dan PKRT	Kasi Alkes dan PKRT	Softcopy dan haardcopy (buku dan banner) <a href="http://regalkes.depkes.go.id/">http://regalkes.depkes.go.id/</a>
37		1. Permenkes RI nomor 1189/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga 2. Permenkes RI nomor Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga 3. Permenkes RI nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan Tangga. 4. Permenkes RI nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan 5. Peraturan Gubernur Jawa Timur No 137 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu	e-Infoalkes ini http://infoalkes.depkes.go.id/	Softcopy dan haardcopy (buku dan banner) <a href="http://regalkes.depkes.go.id/">http://regalkes.depkes.go.id/</a>	

Aplikasi pelaporan Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) Produk Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga(PKRT) ke Kementerian Kesehatan RI	Softcopy dan haardcopy (buku dan banner) <a href="http://e-watch.akses.kemkes.go.id/">http://e-watch.akses.kemkes.go.id/</a>
Aplikasi e-Report Alat Kesehatan dan PKRT ini dibangun untuk memfasilitasi pelaporan hasil produksi dan penyaluran Alat Kesehatan oleh Produsen atau Penyalur Alat Kesehatan, serta pelaporan hasil produksi atau impor Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) oleh produsen atau importir PKRT.	Softcopy dan haardcopy (buku dan banner) <a href="http://e-report.akses.kemkes.go.id">http://e-report.akses.kemkes.go.id</a>
Aplikasi ini merupakan rekapitulasi peredaran Alat Kesehatan dan PKRT di dalam / luar negeri serta diharapkan mampu telusur apabila terjadi complain terhadap penggunaan alat kesehatan dan atau PKRT	Softcopy dan haardcopy (buku dan banner) <a href="http://www.p2t.jatimprov.go.id/">http://www.p2t.jatimprov.go.id/</a>
Pelayanan Perijinan Terpadu P2T (memfasilitasi layanan publik dalam proses perizinan yang menerbitkan Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan)	Softcopy dan haardcopy (buku dan banner) <a href="http://esuka.binfar.kemkes.go.id/">http://esuka.binfar.kemkes.go.id/</a>